

**PENUTUPAN KAWASAN INDUSTRI KERJASAMA KAESONG
OLEH KOREA UTARA (KURUN WAKTU TAHUN 2004 – 2016)**

ANDIRA VERGIANO MANFALUTHY

Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Email: vergiano@gmail.com

Abstract:

This research aims to explain about why North Korea as in their leader, Kim Jong Un. Choose to closing the economy bilateral project with South Korea until two times on period 2004 -2016. This project named Kaesong Industrial Area. Despite the project giving so much fortune in North Korea economy and have a much positive impact, Kim Jong Un as their leader seems like unbothered. The data in this research is secondary data from books, website, and other sources. And the technique of analysis of this research is qualitative analysis techniques.

Keywords: North Korea, South Korea, Kaesong

PENDAHULUAN

Membahas mengenai kedua negara yang berbatasan dengan semenanjung Korea ini memang tidak jauh dari ketegangan politik. Sejarahnya yang selalu penuh dengan konflik dimulai pasca Perang Dunia ke 2. Korea dibagi menjadi wilayah kekuasaan Uni Soviet dan Amerika Serikat. Dalam perkembangannya Korea Utara menolak ikut serta dalam pemilihan umum yang diawasi oleh PBB dan diselenggarakan di Korea Selatan pada tahun 1948. Reaksi atas penolakan Korea Utara tersebut mengarah kepada pembentukan dua pemerintahan Korea yang terpisah oleh zona demiliterisasi. Zona Demiliterisasi sendiri merupakan sebuah jalur tanah yang melintasi Semenanjung Korea yang berguna sebagai zona penyangga antara Utara dan Selatan Korea. Berada di sepuluh kilometer di sebelah utara Zona Demiliterisasi Korea, terdapat kawasan yang dianggap menjadi symbol perdamaian bagi kedua Negara yaitu kawasan Industri Kaesong.. Kawasan Industri Kaesong atau *Kaesong Industrial Complex (KIC)* merupakan sebuah kawasan industri yang mulai dioperasikan sejak Desember 2004 sebagai bagian dari reformasi kebijakan ekonomi Korea Utara oleh Kim Jong-il dan kebijakan "Sunshine Policy. Kawasan administrative industri khusus ini terletak di wilayah Korea Utara dan sebagian besar proyek didanai dari Korea Selatan

Awal mula pembentukan Kaesong bertujuan untuk mengembangkan perekonomian kedua Negara dimana Korea Selatan berperan sebagai Negara yang menyediakan teknologi, bahan serta pabrik yang beroperasi, sedangkan Korea Utara berperan sebagai Negara penyedia tempat beroperasi serta buruh yang akan bekerja di pabrik. Kawasan Industri itu dibangun di desa Bong-Dong, kota Kaesong Korea Utara. Perusahaan Hyundai Korea Selatan dan Komisi Perdamaian Asia Pasifik Choson Korea Utara pada bulan Agustus tahun 2000, sepakat untuk memulai proyek itu dalam rangka menarik investasi perusahaan swasta Korea Selatan. Pembangunan kawasan industry Kaesong itu dibangun di atas tanah seluas 3.960.000 meter persegi, termasuk bangunan pabrik seluas 2.400.000 meter persegi. Pada bulan Juni tahun 2004, kawasan industri diresmikan dan barang produk pertama dikeluarkan pada bulan Desember tahun 2004. Rencana utama dari kawasan Industri ini, menurut Hyundai Asan sebagai co founder dari proyek, akan mempunyai luas wilayah sekitar 6000 hektar dan terdapat tempat perbelanjaan, tempat wisata, pemukiman serta fasilitas berteknologi tinggi. KIC dipercaya bisa membangun perekonomian kedua negara, adanya KIC sedikit banyak akan membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat Korea Utara, selain itu juga menjadi penghubung kedua Negara sebagai pereda tekanan konflik antara kedua Korea.

Namun selama dalam kurun waktu 2004 sampai 2013 kawasan ini terus mengalami konflik, sudah 2 kali Kaesong ditutup sepihak oleh Korea Utara. Pertama kali ditutup yaitu pada tanggal 9 Maret 2009. Kedua yaitu pada tanggal 8

April 2013, pada hari itu Korea Utara menarik sekitar 50.000 pekerjanya di kawasan industri Kaesong

Kawasan industri Kaesong sering dijadikan sebagai barometer dinamika hubungan antara pemerintah Seoul dengan pemerintah Pyongyang. Pada tahun 2008 kawasan ini tetap terus beroperasi meskipun ketegangan yang terjadi dari tindakan Korea Selatan dan Amerika Serikat yang dianggap provokatif. Pada awal Juni 2010, kawasan tersebut juga terancam yang dipicu oleh tenggelamnya kapal angkatan laut Korea Selatan, Cheonan. Setelah dilakukan penyelidikan ditentukan bahwa Cheonan telah ditenggelamkan oleh awak kapal selam Korea Utara, Korea Selatan menyatakan akan memotong semua hubungan antar Korea kecuali kawasan Industri Kaesong karena beberapa pertimbangan

RUMUSAN MASALAH

“ Faktor - faktor apa yang membuat pemerintah Korea Utara melakukan penutupan kawasan kerjasama industri Kaesong? ”

PEMBAHASAN

LATIHAN MILITER ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN KOREA SELATAN

Dalam kaitannya dengan konteks internasional, Copplin menjelaskan bahwa situasi politik yang terjadi pada waktu tertentu dapat mempengaruhi bagaimana Negara tersebut berperilaku. Untuk memahami ini jika kita lihat sejarahnya Korea Utara dan Korea Selatan selama ini belum pernah menyatakan adanya perdamaian di kedua Negara sejak dimulainya perang Korea dari tahun 1950. Pada tanggal 27 Juli 1953 Korea Utara beserta wakil United Nations Command (UNC) menandatangani perjanjian *Korean Armistice Agreement* yang mana merupakan perjanjian aksi gencatan senjata antara Korea Utara dan Korea Selatan. Perjanjian tersebut berisi sebuah kesepakatan untuk tidak melakukan agresi militer hingga sebuah kesepakatan untuk berdamai dicapai

Dengan kata lain, hubungan kedua korea hingga saat ini masih dalam konteks berperang karena belum adanya kesepakatan damai. Fakta akan situasi politik kedua Negara korea yang masih belum berdamai membuat keadaan saling curiga terhadap kebijakan luar negeri satu sama lain. Antara lain yaitu adanya latihan militer antara Korea Selatan dan Amerika Serikat yang dilakukan di semenanjung Korea

Hubungan aliansi militer antara Korea Selatan dan Amerika Serikat sudah dimulai sejak dibuatnya perjanjian bilateral *Mutual Defense Treaty* pada tahun 1953.

Perjanjian itu menghasilkan sebuah komitmen hubungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk membantu satu sama lain jika ada serangan eksternal yang mengancam kedua Negara tersebut. Perjanjian itu juga memperbolehkan Amerika Serikat untuk membuat markas militer mereka di wilayah Korea Selatan. Hingga saat ini sekitar 28.500 personil tentara Amerika Serikat yang terdiri dari angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat dan *special operation forces* bermarkas di Korea Selatan

Salah satu wujud kerjasama dari aliansi militer tersebut adalah dengan diadakannya latihan militer *Foal Eagle*. Latihan militer dengan kode *Foal Eagle* tersebut merupakan latihan yang berlangsung selama dua bulan dan merupakan latihan militer bilateral terbesar didunia yang diikuti sekitar 10,000 tentara dari Amerika Serikat. Latihan tersebut diadakan sebagai respon simulasi jika terjadi adanya invasi dari Negara luar

Adanya latihan militer yang dilakukan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat inilah yang membuat pemerintah Korea Utara menutup kawasan industri Kaesong. Menurut Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power, hubungan internasional merupakan studi dari pola-pola tindakan (aksi) dan reaksi, diantara negara-negara berdaulat yang diwakili oleh elit-elit yang memerintah mereka. Jika kita tarik kesimpulan dari pendapat tersebut maka terlihat pola yang dilakukan pemerintah Korea Utara dalam membuat kebijakannya dimana Kaesong dua kali ditutup pada saat sedang berlangsungnya latihan *Foal Eagle*.

Dua minggu sebelum pemerintah Korea Utara menutup Kawasan Industri Kaesong yang pertama kali, Korea Selatan dan Amerika Serikat sedang menjalankan latihan militer *Foal Eagle* yang mulai berlangsung sejak 28 Februari 2009. Latihan militer ini juga membuat pemerintah Korea utara mempersiapkan militernya dalam keadaan “siap berperang” dan memandang latihan ini sebagai persiapan untuk invasi. Kemudian adanya latihan *Foal Eagle* pada tanggal 11 Maret 2013 ini juga membuat Kawasan Industri Kaesong ditutup kembali untuk kedua kalinya pada tanggal 27 Maret 2013 atau dua minggu saat dimulainya latihan militer, hal ini dibenarkan dengan tanggapan pemerintah Korea Utara melalui kantor berita KCNA tiga hari setelah penutupan

PENGARUH CHINA PADA PEREKONOMIAN KOREA UTARA DAN KUATNYA MILITER

Menurut Copplin, pengambil keputusan atau *policy maker* harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan militer dalam membuat kebijakan luar

negeri mereka. Pengambil keputusan harus mempertimbangkan kekuatan ekonomi dan militer, serta kelemahan negaranya dalam menyusun politik luar negeri. *Policy maker* harus mengukur akan komitmen dan kemampuannya dengan memahami keterbatasan-keterbatasannya yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi dan militer

Dalam memahami bagaimana Korea Utara mengambil keputusan tersebut maka kita harus melihat seberapa besar kemampuan ekonomi dan militer Negara pembuat keputusan untuk menerima resiko akan kebijakan yang dibuatnya. Merujuk pada pendapat Copplin, untuk mengukur kekuatan ekonomi sebuah Negara dapat diukur dengan GNP (*Gross National Product*) indikatornya semakin besar GNP sebuah Negara maka akan semakin makmur. Korea Utara sendiri mempunyai total pendapatan GNP (*Gross National Product*) Korea Utara pada tahun 2011 sebesar US\$ 29,3 miliar dan mempunyai pertumbuhan hanya 0,8%.

Dalam keterbatasan kemampuan ekonomi tersebut, Korea Utara selama ini bergantung pada bantuan luar negeri sejak blok sosialis hancur pada pertengahan tahun 1990-an. Salah satu Negara yang sering memberikan bantuan luar negerinya yaitu China yang mana hampir setengah dari total seluruh bantuan luar negeri China diberikan kepada Korea Utara. Sebagai contoh, pada tahun 1996, Beijing menyetujui untuk memberikan bantuan tahunan dalam bentuk 1,3 juta ton minyak mentah dan 2,5 juta ton batu bara selama lima tahun

Membahas mengenai kondisi ekonomi yang dimiliki oleh Korea Utara, disini negara China merupakan salah satu mitra terbesar Korea Utara dalam kerjasama ekonomi. Sebagai Negara yang menganut isolasi dalam perekonomiannya, Korea Utara lebih sering bergantung pada China dalam stabilitas dan perkembangan ekonominya. China merupakan sekutu terdekat yang menyediakan bantuan makanan, bahan bakar, mesin industry, investasi dan bantuan ekonomi lainnya.

Sekitar lebih dari setengah aktivitas perdagangan Korea Utara yaitu dengan China. Volume perdagangan Korea Utara makin membesar seiring dengan tingkat dependensi Negara tersebut dengan China. Pada tahun 1999, Total perdagangan Korea Utara dengan China mencapai 370 juta US dollar atau sekitar 20,4 persen dari total perdagangan luar negeri Korea Utara yang sebesar 1,81 miliar US dollar. Kemudian pada tahun 2013, total perdagangan Korea Utara dengan China melonjak hingga mencapai 89,1% dari total perdagangan luar negerinya atau setara dengan 8,48 miliar US dollar. Berikut adalah tabel total perdagangan luar negeri Korea Utara dengan China yang dilansir oleh Kementerian Unifikasi Korea Selatan

Dengan adanya data tersebut terlihat bahwa ketergantungan Korea Utara dengan Negara China terbilang cukup besar dalam perekonomian negaranya yaitu terhitung pada tahun 2013 mencapai 89,1% dari total perdagangan. Dari kondisi ekonomi tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa persentase ketergantungan Korea Utara akan Korea Selatan disini terbilang cukup kecil jika dibandingkan dengan China, yang mana berarti jika Kawasan Industri Kaesong ditutup maka signifikansi terhadap kondisi ekonomi Korea Utara tidak terlalu besar

Kemudian selanjutnya dalam hal kapabilitas militer. Sesuai dengan dengan teori Copplin mengenai pengambilan keputusan, bahwa faktor kapabilitas militer Negara merupakan salah satu pertimbangan *decision maker* dalam memutuskan kebijakan internasionalnya. Mengenai konteks kapabilitas militer Korea Utara disini mempunyai kekuatan militer yang cukup besar. Hal ini dikarenakan pemerintah Korea Utara mengeluarkan kurang lebih sekitar seperempat GDP (*Gross Domestic Product*) negaranya untuk bidang militer. Menurut *State Department's World Military Expenditures and Arms Transfers* pada laporannya menyatakan bahwa kira-kira Korea Utara menghabiskan kurang lebih sekitar 4 miliar US dollar tiap tahunnya

Untuk bidang militer, Copplin berpendapat bahwa ada 3 kriteria utama, yaitu; jumlah pasukan, tingkat pelatihan dan sifat perlengkapan militernya. Ketiga kriteria tersebut menjadi pembeda antara kekuatan-kekuatan militer suatu negara. Dengan bertumpu pada ketiga kriteria tersebut, *decision maker* dapat melihat sejauh mana kebijakannya akan efektif. Berikut tabel perbandingan jumlah anggota militer dan perlengkapan yang dimiliki antara Korea Utara dan Korea Selatan

Mengenai tingkat pelatihan militer, salah satu ciri khusus dari angkatan militer Korea Utara yaitu fokus dengan spesialisasi khusus dalam mekanisasi senjata, kendaraan lapis baja dan *special operation forces*. Dengan angkatan militer yang memiliki keahlian mekanisasi dan kendaraan lapis baja, pemerintah Korea Utara yakin bahwa hal tersebut sesuai dengan tipe *topography* di kawasan semenanjung Korea dan juga mempertimbangkan efisiensi dalam membawa teknologi perang terbaru. Selain itu pemerintah Korea Utara juga mempunyai *special operation forces* yang berjumlah 200.000, unit ini dilatih khusus untuk berperang dalam segala keadaan dan memiliki kemampuan untuk mencegah serangan baik dari laut ataupun udara

Pertahanan militer kuat yang dimiliki Korea Utara juga tidak lepas dari teknologi persenjataan nuklir. Pemerintah Pyongyang selama ini fokus membangun kekuatannya melalui persenjataan nuklir yang justru menambah posisi tawar Negara tersebut di dunia internasional. Sesuai pendapat Copplin bahwa militer sebuah negara dapat mempengaruhi posisi tawar (*bargaining position*) dimata negara lain sehingga akan menentukan sikap negara lain terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Kekuatan Militer merupakan salah satu unsur penting yang mempengaruhi kapabilitas negara untuk memberikan tekanan terhadap negara lain. Coplin berasumsi bahwa pertimbangan pada aspek kondisi ekonomi dan militer menjadi salah satu faktor pendorong *decision maker* merumuskan suatu formulasi politik luar negerinya di dunia internasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Kim Jong Un dalam konteks ini berani untuk menutup Kaesong yang mana merupakan hubungan kerjasama satu-satunya yang dimiliki kedua Korea

DUKUNGAN KUAT WPK SEBAGAI PARTAI POLITIK KEPADA REZIM KIM

Mengenai domestik politik Copplin menerangkan bahwa politik dalam negeri suatu negara mempunyai peran dalam suatu penyusunan politik luar negeri. Peran tersebut dijelaskan lebih lanjut yaitu adanya ruang interaksi yang saling mempengaruhi antara aktor politik domestik dengan aktor pengambil kebijakan keputusan politik luar negeri. Peran politik dalam negeri terhadap kebijakan politik luar negeri suatu negara sebagaimana dijelaskan dalam Teori William D. Coplin, dipengaruhi oleh aktor-aktor politik dalam negeri yang disebut dengan *policy influencers*. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab pertama, terdapat empat tipe *policy influencers* dalam politik dalam negeri suatu negara kaitannya dengan penyusunan politik luar negeri yaitu, (1) birokratis, (2) kepentingan, (3) Partai, dan (4) Massa yang mempengaruhi.

Setiap *policy influencers* memiliki kontribusi masing-masing dalam penyusunan politik luar negeri suatu negara. Selain itu, setiap negara memiliki karakter yang berbeda sehingga tidak jarang terdapat tipe dominasi *influencer* yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, tergantung dari sistem politik dalam negeri negara tersebut.

Dalam konteks politik dalam negeri Korea Utara, disini terlihat bahwa ada satu aktor politik *policy influencer* dominan yang menjadi pertimbangan *decision maker* yang mana disini adalah rezim Kim yaitu Workers' Party of Korea (WPK). Tipe *policy influencer* ini merupakan *Partisan Influencer*, dijelaskan oleh Coplin tipe ini merupakan tipe dari aktor politik dalam negeri suatu negara dimana terdapat keberadaan suatu partai politik yang dapat mempengaruhi penyusunan suatu politik luar negeri di negaranya. Dalam sistem politik dengan partai tunggal maka peran *partisan influencer* atau partai yang mempengaruhi mempunyai peran dan kendali yang kuat dalam penyusunan politik luar negeri.

Menurut buku yang dikeluarkan Kementerian Unifikasi Korea yang berjudul *Understanding North Korea*, Korea Utara diklasifikasikan sebagai Negara yang menganut sistem politik rezim totalitarian. Sistem politik rezim totalitarian ini mempunyai seorang pemimpin (*Supreme Leader*) atau *Suryong* (pemimpin sebagai pusat) yang berkuasa terhadap partai dan juga negaranya. Dalam definisi politik, rezim disini mengacu pada keseluruhan institusi dan organisasi politik yang membentuk kehidupan bermasyarakat dimana otoritas politik mempertahankan kestabilan pemerintahan berdasarkan ketaatan masyarakatnya. Lebih jelasnya, rezim politik Korea Utara bisa didefinisikan sebagai kombinasi dari satu partai yang berkuasa, yang mana itu hal yang lumrah di Negara sosialis dan satu orang yang berkuasa dengan dicirikan dengan kediktatoran pemimpin tertinggi partai yang tak tertandingi, atau *Suryong*.

Lalu untuk struktur power rezim, peran *Suryong* yang merupakan seorang pemimpin, mempunyai kekuasaan absolut kepada partai, pemerintahan dan militer. Ini karena *Suryong* mempunyai struktur kekuasaan yang tertinggi yang berarti mempunyai *power* melebihi dari seorang pemimpin militer atau pemimpin partai yang mana disini adalah WPK. Karakteristik politik ini sudah berlangsung secara

terus-menerus sepanjang sejarah Korea Utara dan partai selalu tunduk pada sistem yaitu satu ideologi dan satu orang penguasa untuk mendukung rezim. Dengan ini bisa disimpulkan Korea Utara lebih tepatnya merupakan Negara yang diperintah oleh seorang *supreme leader* dari partai atau *Suryong centered dictatorship* bukan sebuah Negara yang diperintah oleh satu partai atau dikuasai oleh kediktatoran partai tertentu.

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Korea Utara mempunyai *policy influencer* berupa *partisan influencer* yaitu *The Workers' Party of Korea* (WPK). WPK merupakan partai politik pertama, partai politik penguasa dan partai politik terbesar di Korea Utara. Partai tersebut didirikan pada tahun 1949 yang merupakan penggabungan dari *the Workers' Party of North Korea* dan *the Workers' Party of South Korea*.

Peran WPK disini cukup signifikan dalam melegitimasi rezim penguasa. Sebagai contoh pada bulan Oktober tahun 1980 diadakan kongress WPK ke enam yang mana disitu meresmikan Kim Jong il sebagai penerus dari ayahnya Kim il Sung. Peresmian ini tidak hanya untuk memperkuat posisi Kim Jong il sebagai penerus rezim namun juga sebagai formalisasi tradisi negara Setelah sepeninggal Kim Jong il yang tiba-tiba, WPK mendeklarasikan Kim Jong Un yang merupakan anak dari Kim Jong il sebagai “*great successor to the cause of juche*” pada 19 Desember, 201. Kemudian bulan April 2012 pada koferensi partai WPK meresmikan Kim Jong Un sebagai penerus dari rezim Kim. Pada konferensi partai ini WPK juga mendeklarasikan Kim Jong il sebagai *Eternal General Secretary* dari menyusul Kim il Sung sebagai *Eternal President of the country* yang sudah diresmikan sebelumnya Proses deklarasi dan peresmian oleh WPK ini menunjukkan bahwa peran partai disini cukup signifikan untuk mendukung rezim yang memerintah dengan melegitimasi siapa yang akan menjadi penguasa atau penerus rezim.

Untuk memahami pengaruh WPK sebagai *policy influencer*, sebelumnya akan dijelaskan bagaimana Korea Utara dalam proses mengambil keputusan. Menurut Coplin, dalam sistem politik dengan partai tunggal peran *partisan influencer* atau partai yang mempengaruhi mempunyai peran yang signifikan dan kontrol yang kuat dalam penyusunan politik luar negeri. Dalam kaitannya untuk membuat keputusan, Korea Utara tidak jauh berbeda dengan sistem yang berada di China atau Negara sosialis lainnya. Di Korea Utara, segala isu penting dari hubungan internasional dibuat dan diputuskan pada level kepemimpinan tertinggi di kongress *Workers Party Korean* (WPK), rapat pleno WPK *Central Committee*, dan rapat pertemuan pada WPK *Central Committee Politburo and Secretariat*¹. Hal ini bila kita hubungkan dengan isu penutupan kawasan industri Kaesong yang mana itu merupakan isu hubungan antara kedua korea maka bisa kita tarik kesimpulan WPK mempunyai andil dalam memutuskan kebijakan tersebut. Berarti dalam isu ini bisa dikatakan bahwa disini penutupan kawasan industri yang pertama pada tahun 2009 yang mana Kim

Jong il yang pada saat itu berkuasa dan penutupan industri yang kedua pada tahun 2013 yang mana Kim Jong Un sudah menggantikan ayahnya WPK merupakan *policy influencer* dalam kebijakan tersebut

KESIMPULAN

Berada di sekitar sepuluh kilometer sebelah utara dari zona demiliterisasi Korea kawasan industri Kaesong merupakan proyek ekonomi terakhir yang dimiliki kedua Korea. Dalam proses perencanaan pembangunannya dimulai pada bulan Agustus 2000 yang ditandai dengan adanya penandatanganan kontrak kesepakatan antara Perusahaan Hyundai dan Komite Perdamaian Asia-Pasifik Korea Utara. Lalu, pada bulan November tahun 2002. Meskipun pada awalnya pembukaan Kawasan industri Kaesong merupakan inisiatif dari pemilik dari Hyundai Group yaitu Hyundai Asan namun kedua pemerintahan, Negara Korea Selatan maupun Korea Utara sama-sama terlibat di proyek kerjasama ini. Dalam pembagian perannya Negara Korea Utara menyediakan tempat pabrik beroperasi dan buruh pekerjanya. Korea Selatan mendapat peran sebagai penyedia dana, penyedia pabrik yang akan beroperasi dan teknologi yang digunakan di pabrik tersebut.

Perjalanan kawasan Industri Kaesong sebagai kawasan industri kerjasama dan satu-satunya proyek kerja sama ekonomi yang dimiliki oleh Korea Utara dan Korea Selatan memang tidak selalu berjalan mulus. Sejak dibuka pada tahun 2004 kawasan industri Kaesong kurang lebih sudah menyumbang sekitar 90 juta dollar tiap tahunnya pada perekonomian Korea Utara. Hingga pada tahun 2013 data dari kementerian unfikasi Korea menyatakan bahwa ada 123 perusahaan yang sudah berdiri dan melakukan kegiatan produksi. Buruh pekerja asal Korea Utara juga terhitung sekitar 53 ribu pekerja asal Korea Utara dan ada sekitar 800 pekerja asal Korea selatan. Meskipun kawasan industri Kaesong memberi banyak keuntungan ekonomi bagi Korea Utara namun itu tidak serta merta membuat Korea Utara menjadi lebih terkontrol.

Selama kurun waktu dari tahun 2004 sejak dibukanya kawasan industri Kaesong sudah dua kali kawasan industri Kaesong ditutup oleh Korea Utara. Penutupan yang pertama yaitu terjadi pada tahun 2009 dan yang kedua pada tahun 2013. Dalam teorinya yaitu, pengambilan keputusan luar negeri oleh William D. Coplin, dijelaskan bagaimana untuk memahami kebijakan yang diambil pengambil keputusan akan fenomena atau isu yang terjadi pada negaranya. Dalam bukunya, Coplin emngatakan bahwa dalam memahami suatu keputusan kebijakan politik luar negeri suatu negara maka terdapat tiga pertimbangan sebagai alat pemahaman penyebab negara untuk kemudian memutuskan suatu kebijakan politik luar negeri bagi negaranya. Tiga pertimbangan tersebut adalah: (1) konteks internasional (2) kondisi politik dalam negeri dan (3) kondisi ekonomi serta militer negara. Ketiga pertimbangan tersebut saling berkaitan hingga tercipta kebijakan dalam penyusunan politik luar negeri suatu Negara.

Seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, hal – hal yang menjadi pertimbangan aktor pengambil keputusan yang mana disini yang dimaksud adalah Kim Jong il dan Kim Jong Un dalam menutup kawasan industry Kaesong yang pertama adalah adanya latihan militer yang diadakan oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat. Selama ini Korea Utara dan Korea Selatan tidak pernah menyatakan berdamai sejak perang semenanjung Korea yang terjadi pada tahun 1950. Hal ini membuat Korea Utara terus waspada akan kebijakan Korea Selatan yang berhubungan dengan kedua korea yang mana dalam konteks ini adalah latihan militer yang diadakan oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat. Sudah dua kali kawasan industry Kaesong ditutup pada saat berlangsungnya latihan militer yang dilakukan di semenanjung Korea tersebut. Hal ini dikonfirmasi oleh pemerintah Korea Utara dan menganggap latihan militer ini sebagai protes akan berlangsungnya latihan militer tersebut yang dianggap provokasi untuk berperang. Kedua, dalam segi ekonomi Korea Utara sudah mengalami keadaan miskin sejak blok sosialis runtuh pada pertengahan tahun 1990an. Karena keadaan tersebut Korea Utara menjadi keadaan yang bergantung pada bantuan luar negeri yang mana disini adalah China yang merupakan mitra kerja sama ekonomi terbesarnya. Pada tahun 2013 berdasarkan data dari kementerian unifikasi jumlah persentase perdagangan antara China dengan Korea Utara mencapai lebih dari 80% dari total perdagangan ekonomi Korea Utara. Keadaan ini membuat Korea Utara menjadi lebih tergantung kepada China pada perekonomiannya. Dalam konteks ini hal ini menjadi salah satu pertimbangan pemerintah Korea Utara dalam menutup kawasan industry Kaesong karena perekonomiannya yang tidak terlalu bergantung pada Korea Selatan dan masih memiliki partner aliansi kerjasama yaitu China. Dalam segi militer, Korea Utara memiliki keunggulan banyak dibandingkan dengan militer Korea Selatan karena jumlah belanja militer Korea Utara yang mencapai 30% dari total GDP. Selain itu Korea Utara juga mengembangkan teknologi senjata nuklir sehingga Korea Utara disini mempunyai posisi tawar yang lebih terhadap Negara lain. Ketiga, yaitu adanya dukungan partai politik yang berkuasa yaitu WPK kepada keputusan rezim pemerintah. Hal ini bisa dilihat dari peran WPK untuk memutuskan keputusan luar negeri dimana pemimpin rezim juga merupakan ketua dari partai ini. Berarti dalam mengambil keputusan, disini partai politik yaitu WPK mempunyai pengaruh akan kebijakan yang akan diputuskan oleh aktor pengambil keputusan

Ketiga pertimbangan tersebut merupakan faktor – faktor yang membuat pemerintah Korea Utara untuk memutuskan menutup Kawasan Industri Kaesong. Meskipun kawasan industry tersebut telah menghasilkan banyak keuntungan bagi Korea Utara namun hal tersebut tidak cukup menjadi alasan pemerintah Korea Utara untuk tidak menutup kawasan industry Kaesong hingga dua kali

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin, (2004) *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Bermudez, Joseph S. (2001). *Shield of the Great Leader. The Armed Forces of North Korea. The Armed Forces of Asia*. Sydney: Allen & Unwin
- Bleiker, Roland (2005) *Divided Korea: Toward Culture and Reconciliation*.
University of Chicago Press
- Eul-chul Lim, "Legal Reforms and Foreign Investment in the Inter-Korean Project: The Kaesong Industrial Complex," *North Korean Review*, Spring 2008, pp. 26–39.
- Eul-chul Lim, *Kaesong Industrial Complex: History, Pending Issues, and Outlook* (Seoul: Hae nam Publishing Company, 2006);
- Holsti, K.J, (1988) *Politik internasional, jilid 2 : kerangka untuk analisis*
Jakarta: Erlangga
- Jack C. Plano & Roy Olton (1999), *Kamus Hubungan Internasional*, terjem.
Wawan Juanda. Jakarta: Putra A Bardin.
- John W. Cresweel, (1993) *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach*. London: Sage
- Kim Jin-moo, (2013) *Different Stance Between North and South Korea on The Kaesong Industrial Complex and Its Future Prospect*, Korean Institute for Defense Anelyses, Issue 85,
- Mas'oed. Mochtar, (1990) *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan metodologi*. Jakarta: LP3S
- Nasution, Dahlan, (1991) *Politik Internasional; Konsep dan teori*
Jakarta: Erlangga
- Soekanto, Soerjono, (1990) *Sosiologi : Suatu Pengantar*
Jakarta: Grafindo Persada 2000
- Sumanto, (1995) *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*,
Yogyakarta: Andi Offset

T.May Rudy, (2002) *Study Strategis dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang dingin*, Bandung , Refika Aditama

William D Coplin dan Marsedes Marbun (2003). *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru Algesindo edisi ke 2.. 30

Young Whan Kihl (1985). *North Korea in 1984: "The Hermit Kingdom" Turns Outward!*. University of California Press

